

## **ABSTRAK**

### **“PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH DALAM PENGALOKASIAN TANAH FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM DI ATAS PERUMAHAN DI JAKARTA”**

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2009 menjelaskan developer Jakarta harus menyerahkan fasos dan fasum sebesar 40% dan 60% untuk pembangunan perumahan, akan tetapi tidak semua developer menyerahkan fasos dan fasum berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilih masalah ini.

Penelitian ini dilakukan di kota Jakarta dengan sasaran penelitian pada Perumahan yang terdiri dari : perumahan milik pemerintah dan perumahan swasta, yang mana perumahan milik pemerintah yaitu Perumnas dan perumahan swasta yaitu PT. Baratama dan PT. Prima Karya Manunggal. Selain itu juga dilakukan penelitian pada Pemerintah Kota Jakarta Selatan yaitu pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan kota Jakarta, Balai Kota Jakarta pada bagian Perlengkapan Sekretariat Kota Jakarta.

Berdasarkan ini menggunakan data primer dan data sekunder dari hasil kuesioner, wawancara dan bahan-bahan hukum kemudian diuraikan dalam tabel frekuensi secara kualitatif dan deskriptif sehingga penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana proses pengadaan dan penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dari developer kepada Pemerintah Daerah, dan bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan fasilitas-fasilitas tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian penyediaan fasos dan fasum oleh devloper yakni hanya delapan yang menyediakan fasos dan fasum, sedangkan lainnya tidak menyediakan karena

## **ABSTRACT**

### **" GOVERNMENT ACCOUNTABILITY IN THE ALLOCATION OF LAND FOR SOCIAL FACILITIES AND PUBLIC FACILITIES IN HOUSING IN JAKARTA "**

Under Regulation No. 1 of 2009 describes Jakarta developer must submit fasos and public facilities by 40% and 60% for residential development, but not all developers submit fasos and public facilities based on the background of the authors chose this issue.

This research was conducted in the city with the goal of research on the housing consists of: government-owned housing and private housing, which are government-owned housing and private housing Housing namely PT. Baratama and PT. Manunggal Karya Prima. It also conducted research in South Jakarta City Government, namely the Department of Spatial Planning and Building in Jakarta, the Jakarta City Hall in the city of Jakarta Secretariat equipment.

By using primary data and secondary data from questionnaires, interviews and legal materials later described in the table frequency qualitative and descriptive so that this research explains how the process of procurement and delivery of social facilities and public facilities from the developer to the Government elapsed areas, and how Local Government responsibilities for the management of these facilities.

Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the supply agreement by developer fasos and public facility that is only eight that provide social facilities and public facilities, while others do not